

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sektor pariwisata, infrastruktur jalan, dan akses internet terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010–2025 dengan menggunakan metode regresi data panel dinamis *Generalized Method of Moments* (GMM), maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kemiskinan pada periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada periode berjalan di Sumatera Barat, yang menunjukkan adanya persistensi kemiskinan (*poverty persistence*), yaitu kondisi ketika kemiskinan pada suatu periode cenderung terbawa dan memengaruhi tingkat kemiskinan pada periode berikutnya. Temuan ini sejalan dengan Febriani et al. (2026) dan Samiani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan masa lalu memiliki peran penting dalam menjelaskan tingkat kemiskinan saat ini. Dengan demikian, diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang untuk mengurangi persistensi kemiskinan dan mencegah kemiskinan berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya.
- b) Variabel pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas dan kontribusi sektor pariwisata mampu mendorong penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya usaha-usaha lokal seperti kuliner, penginapan, transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya. Semakin berkembang sektor pariwisata di suatu daerah, maka peluang ekonomi masyarakat juga semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
- c) Variabel infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dan peningkatan panjang jalan kondisi baik belum sepenuhnya mampu

memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kondisi ini dapat terjadi karena pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup panjang agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Selain itu, masih terdapat ketimpangan kualitas infrastruktur antar wilayah, terutama pada daerah terpencil dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses ekonomi dan mobilitas masyarakat.

- d) Variabel akses internet berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan penggunaan internet memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mengembangkan usaha berbasis digital, memperluas pasar, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Akses internet juga mendukung aktivitas pendidikan, perdagangan, promosi pariwisata, dan layanan digital lainnya yang secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
- e) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan akses internet menjadi faktor yang lebih dominan dalam mendukung penurunan kemiskinan dibandingkan infrastruktur jalan selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi berbasis jasa dan digitalisasi memiliki peranan yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
- f) Secara umum, tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan adanya ketimpangan. Daerah yang memiliki akses pariwisata, infrastruktur, dan teknologi digital yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan keterbatasan akses ekonomi dan konektivitas wilayah. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis biplot, terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terkait pariwisata, infrastruktur jalan, akses internet, dan tingkat kemiskinan. Kota

Padang dan Kota Bukittinggi cenderung memiliki kedekatan dengan variabel pariwisata, yang menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut memiliki potensi dan aktivitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen utama dalam strategi pengentasan kemiskinan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan aktivitas pariwisata mampu menurunkan jumlah penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil biplot juga menunjukkan bahwa Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki kedekatan yang kuat dengan variabel pariwisata, sehingga kedua daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan pariwisata regional. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat promosi berbasis digital, serta mendorong keterlibatan UMKM dan ekonomi kreatif agar manfaat sektor pariwisata dapat menyebar ke daerah-daerah di sekitarnya.
- b) Pembangunan infrastruktur jalan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi wilayah, bukan hanya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik. Hasil regresi menunjukkan bahwa infrastruktur jalan belum mampu memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan secara langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan jalan yang dilakukan selama periode penelitian belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, hasil biplot menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dan Solok Selatan memiliki karakteristik yang relatif dekat dengan variabel infrastruktur jalan. Oleh karena itu, pembangunan jalan di daerah tersebut perlu diintegrasikan dengan pengembangan sentra pertanian, perdagangan, industri kecil, dan kawasan wisata sehingga infrastruktur yang tersedia mampu menciptakan nilai

tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c) Pemerataan akses internet perlu menjadi prioritas dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses internet berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui perluasan akses informasi, peningkatan produktivitas, serta terbukanya peluang usaha berbasis digital. Berdasarkan hasil biplot, daerah perkotaan seperti Kota Solok, Kota Padang Panjang, Sawahlunto, dan Pariaman menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah yang masih tertinggal serta meningkatkan program literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan internet untuk kegiatan ekonomi produktif, pemasaran produk lokal, dan pengembangan usaha mikro berbasis teknologi.
- d) Pemerintah perlu memberikan prioritas pembangunan yang lebih besar kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan kemiskinan paling tinggi. Hasil biplot menunjukkan bahwa Kepulauan Mentawai berada paling dekat dengan variabel kemiskinan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Mentawai masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi melalui peningkatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, perluasan akses internet, pengembangan potensi pariwisata bahari, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan pendekatan tersebut, kesenjangan pembangunan antara Mentawai dan daerah lain di Sumatera Barat dapat dikurang.

Selanjutnya berdasarkan analisis biplot, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing wilayah (*place-based development policy*). Hasil biplot menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda. Kota Padang dan Bukittinggi memiliki keunggulan pada sektor pariwisata, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam,

dan Solok Selatan memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan infrastruktur jalan, sedangkan Kepulauan Mentawai masih dihadapkan pada masalah kemiskinan yang relatif tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang seragam tidak akan menghasilkan efektivitas yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun program pembangunan yang lebih spesifik berdasarkan potensi dan permasalahan masing-masing daerah agar alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi lebih besar. Sinergi antara pengembangan pariwisata, infrastruktur, dan digitalisasi perlu diperkuat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Hasil regresi menunjukkan bahwa pariwisata dan akses internet merupakan faktor yang paling berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan hasil biplot menunjukkan adanya keterkaitan karakteristik antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata sebaiknya tidak dilakukan secara terpisah dari pembangunan infrastruktur dan teknologi digital. Pengembangan destinasi wisata perlu didukung oleh akses jalan yang memadai serta promosi dan pemasaran digital yang efektif. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan lebih luas, meningkatkan kesempatan kerja, memperkuat perekonomian daerah, dan pada akhirnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

